



Evaluasi kelembagaan panti terpadu

Muhammad Ardi Nupi Hasyim^{1*}, Eka Setniajatnika²

^{1,2}Universitas Koperasi Indonesia

* nupihasyim@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 Juni 2024

Disetujui :

10 Juli 2024

Dipublikasikan :

31 Juli 2024

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, perlu adanya evaluasi terkait berjalannya suatu lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelembagaan panti terpadu guna membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan Program Kawasan Panti Terpadu Provinsi Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten ini tidak hanya sebagai alternatif pengasuhan saja melainkan juga mendidik anak asuhnya menjadi pribadi unggul, berkompeten, serta memiliki wawasan yang luas dengan pemberian pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan pelatihan keterampilan bagi penghuninya. Selain itu, panti asuhan ini juga menerapkan sistem ramah lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa kelembagaan panti terpadu telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Evaluasi, Panti asuhan, Terpadu, Lembaga

ABSTRACT

In order to realize good bureaucratic reform, an evaluation is needed regarding the running of an institution. This study aims to evaluate the institution of integrated orphanages in order to build an evaluation system for government agencies that can dynamically capture the existence of government organizations in the context of increasing the effectiveness of achieving organizational performance. The research method used is a qualitative research method with descriptive analysis. The results of the study indicate that the legal basis for the implementation of the Banten Province Integrated Orphanage Area Program is in accordance with applicable laws and regulations. The function of the Integrated Orphanage in Banten Province is not only as an alternative for care but also to educate its foster children to become superior, competent individuals, and have broad insights by providing formal and non-formal education and providing skills training for its residents. In addition, this orphanage also implements an environmentally friendly system. It can be concluded that the institution of the integrated orphanage has been running well.

Keywords: Evaluation, Orphanage, Integrated, Institution



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa suatu Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada penduduknya dalam upaya memberikan fasilitas guna tercapainya kesejahteraan sosial yang merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu upaya memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui sistem panti.

Pelayanan sistem panti ini merupakan pelayanan alternatif apabila fungsi dan peran keluarga/masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu dibutuhkan keberadaan panti sosial terpadu. Keberadaan Panti Sosial Terpadu untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang masalah sosial. Bertugas melakukan deteksi dan pencegahan, rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri dan kemandiriannya, dan mengembalikan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke tengah masyarakat. Panti ini juga bertugas melakukan pengembangan individu dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi di masyarakat. Panti ini tidak terlepas dari fungsi panti dalam bekerja, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi atau sebagai penerus generasi bangsa, fungsi pendidikan dan sosialisasi, ekonomi, proteksi, dan pembinaan lingkungan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yossi (2018) menyatakan bahwa PSBR "Rumbai" Pekanbaru Cukup Baik dalam melakukan pembinaan kepada remaja putus sekolah dalam bentuk pembinaan bimbingan keterampilan berupa bimbingan keterampilan otomotif roda dua, keterampilan menjahit, keterampilan tata rias, keterampilan teknik las. Penelitian lainnya menyatakan bahwa pelayanan panti asuhan telah efektif karena panti menyediakan standar operasional pelayanana bagi pekerja sosial (Hendrayani, 2020). Penelitian lain dilakukan saat pandemi Covid-19, menyatakan bahwa peningkatan kasus Covid-19 justru mendorong panti dan lembaga pendukung lain untuk terus memberikan pelayanan ekstra di bidang kesehatan sehingga menunjukkan kelembagaan panti telah berjalan dengan baik meskipun terjadinya pandemi (Yusuf, 2022).

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang baik, karenanya perlu adanya evaluasi terkait kelembagaan panti terpadu untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Banten. Jenis data dan informasi terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicermati atau dicatat untuk pertama kali oleh si peneliti sendiri. Umar Husein (Nugrahani, 2014) menjelaskan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/responden terkait. Data Sekunder yaitu data yang bukan diperoleh sendiri oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2018), data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data ini diperoleh dengan mengambil data yang telah tersedia oleh pihak-pihak lain berupa laporan-laporan, informasi dari dokumen, publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Dalam kajian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penetapan batas-batas penelitian, mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara yang terstruktur dan semi struktur, mengumpulkan dokumen dan materi-materi visual (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah survey, pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung data penelitian dan wawancara yang dilakukan berdasarkan Informan dan FGD. Selanjutnya dalam tahap analisis data dan perumusan hasil digunakan pendekatan *scientific problem solving*.

Dalam kajian ini akan digunakan 2 (dua) metode teknik analisis data, meliputi analisis deskriptif dan metode kualitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis bersifat uraian atau penjelasan dengan membuat tabel-tabel, grafik-grafik, bagan, mengelompokkan, menganalisa data berdasarkan pada hasil jawaban wawancara yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan tabulasi data. Metode kualitatif yang dilakukan dengan melakukan triangulasi, melakukan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, dengan cara membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi kehadiran partisipan untuk mengecek apakah

mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. Pada proses ini peneliti dapat melakukan wawancara tindak lanjut terhadap para partisipan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkomentar tentang hasil penelitian ini. Serta melakukan tanya jawab (*konfirmatif*) kepada ahli pada bidang yang sama untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah PPKS dari tahun ketahun terus meningkat. Berdasarkan data populasi yang tersedia, terdapat total sekitar 75,04 juta jiwa PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Angka populasi ini merupakan kumulatif dari 5 (lima) kluster PMKS yang terdiri dari: kluster Anak sebesar 27,4 juta jiwa (Hidayatullah, 2014), Penyandang Disabilitas 30,4 juta jiwa (Amalia & Zulyadi, 2024), Korban Penyalahgunaan Napza 3,6 juta jiwa (Manela, 2015), Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 1,04 juta jiwa (Ramli, 2018), dan Lanjut Usia 12,6 juta jiwa (Nurjismi, 2021). Dari data tersebut, tampak bahwa terdapat sekitar 27,8% warga negara Indonesia dari total penduduk 270-an juta yang belum dapat melaksanakan “fungsi sosialnya secara wajar dalam lingkungan sosialnya” karena mengalami suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan yang membuat mereka memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Keterbatasan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang adalah dalam mengakses kebutuhan dasarnya. Jika dipahami dari perspektif Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, maka itu artinya terdapat sekitar 27,8% penduduk Indonesia yang sedang berada dalam kondisi tertentu yang membuat mereka tidak mampu: (1) memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, (2) melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta (3) mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Saat ini penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia secara nasional masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Komitmen pemerintah tersebut ditunjukkan dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa suatu Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada penduduknya dalam upaya memberikan fasilitas guna tercapainya kesejahteraan sosial yang merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”. Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah sesuai yang dicantumkan dalam pasal 34 UUD 1945, bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan bukan hanya sekedar alternatif pengasuhan saja, melainkan terdapat beberapa aspek lain yang melingkupinya, contohnya melindungi, melayani, mengasuh, mendampingi, melakukan rehabilitasi, serta membina. Membina disini yaitu berupa bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut. Membina disini dapat diartikan sebagian rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya. Standar pelayanan sosial sistem panti disusun Kementerian Sosial sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing panti. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah Provinsi

terdapat 4 macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus dapat diberikan pelayanan, diantaranya Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandang atau Pengemis.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia melalui Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah dilakukan. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Adapun masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Meskipun berbagai kebijakan telah dijalankan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial namun masih ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi (Renstra 2010-2014 Kementerian Sosial) antara lain: (1) cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi masih sangat terbatas, (2) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (3) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (4) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (5) peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (6) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (7) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dari uraian diatas mengenai permasalahan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial maka pemerintah dituntut untuk bekerja keras untuk menuntaskan masalah kesejahteraan sosial salah satunya melalui pengembangan inovasi kawasan kelembagaan panti terpadu yang akan dibuat di Provinsi Banten. Untuk saat ini, Pemprov Banten baru memiliki dua pelayanan PMKS, diantaranya panti bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Pemprov Banten terus berupa untuk memenuhi amanat undang-undang, dan rencana pembangunan kawasan terpadu sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas kesulitan yang di hadapi oleh PMKS. Kawasan Terpadu Panti Sosial tersebut direncanakan akan dibangun diatas lahan dengan luas 8 hektar, dimana akan dibangun sebanyak 4 gedung untuk memberikan pelayanan kepada 4 PMKS. Rencananya akan dibuat 4 cluster, masing-masing untuk disabilitas, anak telantar, lansia terlantar, dan gelandang atau pengemis. Diharapkan dengan adanya proyek kawasan panti asuhan terpadu ini dapat mengurangi jumlah Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandang atau Pengemis, serta membantu penyandang disabilitas dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka serta membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Adapun dibuatnya kawasan terpadu ini berdasarkan:

1. Ketertarikan (*Interest*)

Panti asuhan terpadu merupakan lembaga sosial yang bergerak pada bidang kemanusiaan, selain sangat dibutuhkan, biasanya sebuah panti asuhan swasta kebanyakan menggunakan implementasi ajaran sebuah agama (Islam, Katolik, Budha dan agama lainnya). Di sini mengambil sebuah konsep dimana panti asuhan yang direncanakan yaitu panti asuhan terpadu dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Kepentingan Mendesak (*Urgency*)

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap kesejahteraan anak diperlukannya sebuah wadah yang memfasilitasi anak-anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan/pengemis, serta penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan dan penyantunan untuk memberikan fasilitas pengembangan diri sebagai usaha untuk fokus pada lansia telantar, penyandang disabilitas, gelandangan atau pengemis, dan anak -anak serta balita telantar.

3. Kebutuhan (*Need*)

Minimnya jumlah panti asuhan yang ada di Provinsi Banten serta sarana prasarana masih belum memenuhi standar, dari segi sarana gedung, peralatan untuk menunjang pelatihan-pelatihan

keterampilan dan mengoptimalkan keberfungsian panti di bawah naungan Dinsos Banten yaitu Balai Perlindungan Sosial dan Balai Pemulihan dan Perlindungan Sosial (BP2S).

4. Keterkaitan (*Relevancy*)

Sedikitnya jumlah dan belum optimalnya panti asuhan di Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak terlantar dari keluarga kurang mampu mempunyai keterkaitan mengenai diperlukannya sebuah panti asuhan yang baru khususnya panti asuhan terpadu.

Konsep Kelembagaan Panti Terpadu

1. Aspek Citra

Aspek pencitraan yang akan ditampilkan pada proyek Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten adalah menciptakan suasana yang mengandung makna kekeluargaan bagi seluruh penghuni panti asuhan serta menciptakan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar agar semangat kekeluargaan yang diikutsertakan dalam proyek ini dapat membantu perkembangan anak asuh supaya dapat berkembang selayaknya berada di keluarga sendiri hal ini ditandai dengan adanya fasilitas yang diberikan seperti pusat keterampilan, taman, lapangan olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar supaya mereka dapat menjadi bagian dari keluarga besar panti asuhan sehingga anak juga tidak merasa seperti dibatasi dan dapat dengan leluasa dapat mengembangkan diri mereka melalui interaksi dengan masyarakat sekitar.

2. Aspek Fungsi

Fungsi Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten ini tidak hanya sebagai alternatif pengasuhan saja melainkan juga mendidik anak asuhnya menjadi pribadi unggul, berkompeten, serta memiliki wawasan yang luas dengan pemberian pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan pelatihan keterampilan bagi penghuninya, selain itu masyarakat sekitar juga dapat menggunakan beberapa fasilitas yang ada di panti asuhan ini supaya terjadi interaksi sosial antara penghuni panti asuhan dengan masyarakat sekitar yang diharapkan juga dapat membantu proses perkembangan anak baik secara fisik maupun nonfisik.

3. Aspek Teknologi

Ketersediaan teknologi yang memadai akan membantu dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketersediaan dari teknologi yang lebih ditekankan ialah pada fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program Panti Terpadu di Provinsi Banten dengan memadainya teknologi tentu akan menunjang kondisi fisik dan kesejahteraan bagi penghuni panti. Penghuni panti membutuhkan dukungan dari keluarga untuk memberikan mereka suatu pelayanan dan kasih sayang disetiap kebutuhannya.

Ada beberapa teknologi yang akan diterapkan pada proyek Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten seperti penggunaan solar panel untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik panti asuhan, menggunakan teknologi pengolahan pemanenan air hujan (*rain harvesting*) untuk membantu memenuhi kebutuhan air, menggunakan teknologi dalam bidang keamanan bangunan seperti *fire fighting* dan CCTV serta sarana dan prasarana lainnya

4. Ramah Lingkungan

Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten ini menerapkan sistem ramah lingkungan hal ini dengan adanya prinsip yang diterapkan yaitu mengolah limbah yang dihasilkan oleh panti asuhan ini secara mandiri, contohnya pengolahan limbah cair dari air hujan dan air kotor lainnya dengan cara melakukan treatment agar dapat digunakan kembali dan juga membuat resapan lubang biopori, pengolahan *Black Water* dengan menggunakan beo septic tank serta pengolahan sampah yang dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik, sampah organik dapat digunakan sebagai isi dari lubang biopori sehingga dapat menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik dapat dipilah dan digunakan kembali.

5. Aspek Manajemen

Suatu program akan berhasil apabila didukung oleh manajemen yang memadai, adapun berikut tugas dan fungsi manajemen di panti asuhan terpadu:

a. Kepala Panti Terpadu

Kepala panti terpadu mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan panti, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan panti,

serta menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan panti agar terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sekertariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala panti, yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinir rencana program dan pengendalian anggaran sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan panti, dan pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja panti agar terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sekretariat membawahi Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan

6. Sarana dan Prasarana

Kawasan Panti asuhan ini memiliki kesan terbuka pada masyarakat untuk datang ke lingkungan panti, dengan begitu penyediaan fasilitas publik yang dapat menampung aktivitas mereka, akses mudah, nyaman tidak menutup kemungkinan masyarakat akan dengan senang hati akan datang ke lingkungan panti asuhan sehingga terjadi interaksi sosial.

Tabel 1. Fasilitas Utama Panti Terpadu Provinsi Banten

No	Fasilitas Utama Ruang
1	Asrama Ruang Tidur Penghuni Panti Ruang Tidur Pengasuh Kamar Mandi Ruang Belajar Perpustakaan Ruang Makan Ruang Dapur Ruang Cuci Pakaian Ruang Jemur Ruang Cuci Pakaian Ruang Tamu Pengunjung Ruang Komunikasi Ruang Tidur Tamu Pengunjung Gudang Makanan Gudang Alat/Perabot Ruang Konseling Ruang Tidur Koki
2	Tempat Ibadah Ruang Wudhu Kamar Mandi Ruang Ibadah

Tabel 2. Fasilitas Penunjang Panti Terpadu Provinsi Banten

No	Fasilitas Penunjang Ruang
1	Ruang Keterampilan Ruang Keterampilan Menjahit Ruang Keterampilan Komputer Ruang Keterampilan Elektronik Gudang Bahan dan Alat Ruang Display Pakaian Ruang Koordinator

No	Fasilitas Penunjang Ruang
2	Ruang Serbaguna Aula Ruang Musik Ruang Kesenian Ruang Pengembangan Bakat
3	Ruang Kesehatan Ruang Cek Up Ruang Konsultasi Dokter Ruang Khusus Penyakit Menular Ruang Opname Ruang Obat Ruang Dinas Dokter
4	Ruang Pengembangan Fisik/Gizi Ruang Cek Up Ruang Konsultasi
5	Ruang Psikolog Ruang Konsultasi Ruang Tes Psikolog
6	Ruang Les Ruang Les Ruang Guru Les
7	Lapangan Olah Raga Lapang Basket Lapang Futsal Lapang Badminton

Tabel 3. Fasilitas Pengelola Panti Terpadu Provinsi Banten

No	Fasilitas Pengelola Ruang
1	Ruang Kepala Panti
2	Kantor Ruang Sekretariat Ruang Sub Bagian Program dan Evaluasi Ruang Sub Bagian Keuangan Ruang Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Ruang Bidang Pemberdayaan Ruang Tata Usaha Ruang Pegawai Ruang Tamu Ruang Tunggu Ruang Rapat Ruang OB Ruang Sopir Ruang Koordinator Pengasuh Pantry Resepsionis Ruang Informasi

Tabel 4. Fasilitas Pelayanan Panti Terpadu Provinsi Banten

No	Fasilitas Pelayanan Ruang
1	Fasilitas Service Bangunan Ruang CCTV Ruang Ganset Ruang Panel Listrik Ruang Pengolahan Air
2	Pelayanan Publik Pos Keamanan Ruang Parkir Taman Kebun

Model Pelayanan, Pembinaan, Rehabilitasi Sosial, Dan Pendampingan Di Panti Terpadu

1. Pelayanan Sosial

Ada dua cara dalam Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial, yaitu Pelayanan Sosial Langsung dan Pelayanan Sosial tidak Langsung, dalam penanganan klien.

Pelayanan Langsung dalam Pekerjaan Sosial

a. Intervensi Terhadap Nilai Individu

Berbagai teori seperti sosial *case work* pada abad ke 20 telah menjurus pada keterampilan teknik yang telah disempurnakan dan menyatu dengan pengetahuan tingkah laku psikologi, sosiologi keluarga, psikologi kepribadian yang disebut Neo Freudian *Theory* dan sistem ilegal. Teori *Social Case Work* sudah dipengaruhi oleh teori *psychoanalysis* Tradisional, kemudian pada tahun-tahun terakhir ini Neo Freudian Theori yang dipelopori oleh Eric Berne diperkenalkan modifikasi teori-teori pada sekolah yang dipimpinnya.

Dalam menghadapi masalah emosional melalui teknik intervensi krisis, intervensi kerja sama sosial, tetapi multi dampak, tetapi realitas dan telah mendapat kritikan yang tajam, sebab dianggap kurang tepat digunakan dalam pendekatan *case work*. Dari kritik-kritik itu lahir pendekatan baru yaitu terapi kerjasama keluarga yang tetap terfokus ada individu, penyandang masalah yang melibatkan anggota keluarga yang lainnya dan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini keluarga dan orang lain di sekitarnya dapat dijadikan sumber penting untuk memberikan bantuan/dorongan sosial yang bermanfaat bagi klien, dan dapat memberikan bantuan lain kepada klien yang sedang dalam posisi sulit.

b. Intervensi Terhadap Nilai Keluarga

Keluarga tidak hanya sebagai satu kumpulan orang tetapi juga sebagai untuk sistem dinamis dimana hubungan sebagai akibat perkawinan merupakan titik pusat terbentuknya keseluruhan hubungan. Tinjauan sentral mengenai keluarga ini sebagai suatu sistem yaitu : anggota keluarga saling memberikan reaksi sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam komunikasi, banyak masalah-masalah keluarga yang bermula dari terjadinya gangguan pada komunikasi di antara anggota keluarga, gangguan ini meliputi komunikasi yang tidak serasi, dimana terjadi penyampaian pesan-pesan yang tidak serasi.

c. Intervensi Terhadap Nilai Kelompok

Social group work adalah proses untuk membentuk individu dalam kelompok, dalam hubungan mereka satu sama lain dan membantu kelompok mereka pada fungsi yang lebih efektif. Usaha yang dilakukan dengan menciptakan kegiatan kelompok alamiah seperti : sekolah, kelompok,, rekreasi dan lainnya.

Hubungan pekerja sosial kelompok dengan anggota kelompok yang ditanganinya adalah merupakan hubungan kerja, dalam pengertian pekerjaan sosial kelompok berada di dalam anggota kelompok, berpartisipasi dalam kelompok tetap mengarah pada pengertian profesi untuk membantu menentukan kebutuhan-kebutuhan anggota secara individu dan jenis pertolongan. Dalam hal ini pekerja kelompok dengan mengasumsikan tanggung jawab, pekerja sosial kelompok harus sadar terhadap profesinya dan mempunyai kemampuan untuk mengontrol semangat pribadi,

nilai, kesenangan dan mampu menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan dan kepuasan yang maksimal. Metode kerja kelompok masuk dalam ilmu kategori : 1. Penguasa; pimpinan yang baik, anggota yang taat. 2. Personifikasi; pekerja sosial kelompok yang bertindak sebagai figur model, para anggotanya meniru dan mencoba menemukan kemampuan mereka yang selayaknya. 3. Preseptif; pekerja sosial memberikan intruksi kepada anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas serta keterampilan yang diarahkan untuk menggali potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. 4. Manipulasi; pekerja kelompok memimpin melalui fase perencanaan dan pembuatan keputusan, akan tetapi tetap diusahakan sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok tidak merasa dimanipulasikan. 5. Memungkinkan; pekerja kelompok membantu anggota untuk berpartisipasi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan, perencanaan dan program, terutama dalam menentukan peranannya sendiri, menentukan tujuan, mengembangkan ide, mengembangkan keterampilan dan menentukan sikap.

Dalam masyarakat demokratis poin ke lima lebih tepat karena, bisa membantu anggota kelompok untuk memperoleh kepuasan sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing anggota disamping itu juga mereka mendorong mengepresikan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.

2. Pelayanan Tidak Langsung dalam Pekerjaan Sosial

a. Perencanaan Lembaga

Perencanaan itu pembentukan organisasi pelayanan melalui proses amat sulit, karena harus banyak orang. Hal itu tergantung pada bentuk organisasi, bentuk lingkungan kegiatannya serta konflik terhadap orang yang terlibat dalam proses perubahan. Proses dalam pembentukan perencanaan sebuah lembaga adalah : menyangkut hal-hal sebagai berikut, identifikasi masalah tafsiran kebutuhan, merencanakan sistem kerja kelompok yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, struktur perencanaan serta melaksanakan operasi organisasi.

b. Konsultasi

Konsultasi adalah proses yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan merubah organisasi dan lembaga yang mengalami problem sosial masalah itu bisa berupa konflik dan tujuan, ketidakmampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan tugasnya, masalah struktur organisasi atau kurangnya staf ahli dalam melayani kelompok masyarakat atau masyarakat. Misalnya : Sebuah rumah sakit jiwa harus bergiliran menerima kliennya, karena kekurangan tenaga yang berpengalaman, maka disini pekerja sosial menjadi konsultan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang tepat bagi pengelola rumah sakit yang melayani orang lain. Konsultasi sebagai proses pekerja sosial memerlukan pengetahuan sendiri, pematapan skill yang diperoleh dalam bangku pendidikan formal sekolah pekerjaan sosial. Tugas konsultan disini adalah mengembangkan kecakapan dalam organisasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dimasa mendatang.

Pekerja sosial yang bekerja disini biasanya pengetahuan dan skill yang tinggi dalam individu, kelompok dan masyarakat, serta memiliki pengetahuan khusus tentang permasalahan dalam hal pemeliharaan anak kesejahteraan ekonomi, aspek kejiwaan dan penyakit fisik. Agar tugas bisa berjalan efektif maka pekerja sosial yang mempunyai keterampilan dalam menjalin kerja sama dalam masyarakat, organisasi terkait dan bahkan kelompok masyarakat yang lebih besar lagi.

Seiring juga pekerja sosial bertindak sebagai konsultan terhadap kelompok kecil masyarakat yang tertarik untuk mengadakan pelayanan sosial dengan jalan memberi nasehat kepada mereka bagaimana cara pelayanan yang paling efektif bagi orang yang membutuhkan.

c. Sarana Latihan Dalam Mengembangkan Pelayanan Organisasi

Sarana latihan dan pengembangan organisasi juga digunakan untuk intervensi pada tingkat organisasi dan lembaga. Hal ini juga penting bagi organisasi yang butuh bantuan untuk meningkatkan efektivitasnya. Organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial menggunakan sarana latihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan untuk menuju perubahan yang terarah pada suatu lembaga.

d. Intervensi Terhadap Nilai Masyarakat

Community Organization meliputi serangkaian kegiatan pada tingkat masyarakat baik yang dirasakan oleh individu maupun kelompok dan masyarakat. Kegiatan bimbingan masyarakat ini bisa mencakup masyarakat dalam bentuk yang kecil maupun masyarakat yang luas sebagai bagian dari masyarakat nasional.

Pekerja sosial di dalam bimbingan sosial masyarakat, harus mengetahui dengan baik kebutuhan penting yang diinginkan masyarakat demi peningkatan pelayanan dan perubahan kondisi. Tugas itu dimaksudkan untuk memobilisir kebuhan yang ada memungkinkan masyarakat atau organisasi pelayanan sosial untuk dapat mengkoordinir kegiatannya sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Merencanakan strategi adalah sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan terutama dalam pengembangan masyarakat lebih baik dan lain-lain. Dan pekerja sosial bisa bekerja sama dengan ahli kesehatan masyarakat dengan masalah yang ada kaitannya dengan kesehatan seperti : Perbaikan lembaga.

3. Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan ataupun bimbingan dalam penelitian ini meliputi: bimbingan fisik, bimbingan mental psikologis, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan atau pendidikan dan keterampilan. Pelaksanaan pembinaan ataupun bimbingan dapat berubah (lebih banyak atau lebih sedikit) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Panti.

Upaya pembinaan penghuni Panti Terpadu ini mencakup tiga hal yakni, upaya pembinaan anak jalanan di lingkup pendidikan dalam hal pendidikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, dan pembinaan dalam hal kesehatan baik itu merupakan pembinaan kesehatan secara fisik maupun psikis.

a. Pembinaan pendidikan

Upaya Pembinaan penghuni Panti Terpadu yaitu anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan dalam hal pendidikan ini yang menjadi dasarnya adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu terdapat pada BAB III tentang hak dan kewajiban anak tepatnya pada pasal 9 yang berbunyi 1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.

Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pengantar ilmu pendidikan, bahwa “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak”. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami menuju ke tingkat kedewasaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dari seorang pendidik terhadap peserta didik yang bertujuan untuk memajukan kemampuan intelektual dan emosional seseorang yang berguna untuk berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ahmadi dan Nur Uhbiyati mengatakan menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi 3 macam:

“(1) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, dan organisasi. (2) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah. (3) Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat.”

Upaya Pembinaan pada Panti Terpadu ini mencakup empat hal yaitu penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

b. Pembinaan pendidikan dalam hal pengetahuan

Pembinaan pendidikan dalam hal pengetahuan berupa memberikan suatu pendidikan atau pengetahuan bagi anak jalanan dalam lingkup pendidikan formal maupun informal, anak jalanan diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah merupakan hasil dari tahu dan mengerti. Hal ini terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi yang dimaksud sebagai pengetahuan adalah proses seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelah seseorang itu menjalani pendidikan, baik itu secara formal, informal, maupun non formal.

Pengetahuan untuk penghuni Panti Terpadu dapat berupa pengetahuan tentang penularan penyakit HIV/AIDS, pengetahuan tentang perilaku hidup bersih, pengetahuan penggunaan komputer, dan lain-lain. Dari adanya pendidikan dalam hal pengetahuan anak jalanan yang tadinya tidak tahu, tidak mau tahu, menjadi mengerti dan tahu sehingga mereka memperoleh manfaat yang mereka rasakan dari pengetahuan yang mereka dapat setelah dilakukan Pembinaan.

c. Pembinaan pendidikan dalam hal keterampilan

Pendidikan dalam hal keterampilan disini adalah pelatihan dalam menghasilkan suatu karya. Jadi pendidikan dalam lingkup keterampilan adalah suatu proses yang dimana seseorang dapat menghasilkan karya dari pendidikan yang dia dapatkan.

Berbagai macam keterampilan/kejuruan dibutuhkan oleh orang-orang dewasa sejalan dengan laju kebutuhan manusia dan kemajuan zaman, yang berbeda dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Keterampilan-keterampilan yang ada hubungannya dengan siap pakai, muthakhir dan dibutuhkan masyarakat, memperoleh prioritas utama bagi orang-orang dewasa dalam rangka pencarian nafkah atau pekerjaan dengan lingkup besar seperti industri atau perusahaan. Inilah sebabnya, maka praktek penyelenggaraan pendidikan hendaknya melengkapi pelajar dengan keterampilan untuk merealisasi secara positif terhadap perubahan baik dalam segi meneruskan kemampuan yang secara kejuruan berguna bagi masyarakat maupun kemampuan untuk mempertahankan identitas dalam menghadapi jenis pekerjaan yang berbeda.

Selain sebagai bekal sekaligus sandaran masa depan yang lebih baik, tepat sekali apabila anak memiliki keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Pengetahuan keterampilan sebagai salah satu upaya pengayaan kreatifitas anak agar dalam proses Pembinaan dapat berjalan dengan normal. Keterampilan tersebut berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan menengok kepada kekayaan alam sekitar dan lingkungan terpadu.

Keterampilan saat ini mulai diajarkan dalam lingkup dunia pendidikan dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Mulai dari mempelajari cara memproduksinya sampai cara pemasarannya, contoh kecilnya adanya pelajaran kerajinan tangan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan keterampilan yang dimaksudkan dalam

Pembinaan keterampilan terhadap anak jalanan ini adalah pemberian bekal keterampilan atau pendidikan vokasional yang tujuannya agar anak lebih mandiri, lebih produktif dan tidak kembali ke dunia jalanan. Menurut Puskur Depdiknas (Fitriah et al., 2021) mengatakan:

“Keterampilan vokasional merupakan keterampilan membuat sebuah produk yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Bekal keterampilan vokasional seorang siswa diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidang yang diminatinya. Misalnya kemampuan menservis mobil dapat digunakan sebagai modal kemampuan untuk bekerja di bidang otomotif, atau kemampuan meracik bumbu masakan dapat dijadikan modal kemampuan untuk bekerja pada industri tata boga.”

Keterampilan vokasional terdiri atas dua bagian, yaitu keterampilan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan keterampilan vokasional khusus (*occupational skill*). Keterampilan vokasional dasar mencakup antara lain melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, presisi, akurasi, dan tepat waktu yang mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.

d. Pembinaan pendidikan dalam hal sikap

Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang objek tadi. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap suatu hal, suatu objek, tidak ada sikap yang tanpa objek manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang tetapi juga peristiwa-peristiwa, pandangan-

pandangan, lembaga-lembaga, terhadap norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain. Ciri-ciri sikap adalah:

- (1) Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat.
- (2) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan karena itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
- (3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau dirubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
- (4) Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- (5) Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini penting sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara:

- (1) Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap
- (2) Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya tersendiri pula.
- (3) Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu.
- (4) Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan individu yang lain di sekitarnya.

Pendidikan dalam hal sikap bisa diamati melalui belajar menentukan sikap, sikap merupakan kondisi intern dalam diri individu yang berperan dalam tindakan-tindakan yang diambil, lebih-lebih apabila terdapat berbagai aspek yang paling penting adalah aspek kemauan dan kerelaan untuk bertindak, meskipun aspek kognitif dan aspek afektif tetap berperan pula (Alang, 2015). Adanya ketiga aspek dalam suatu sikap memungkinkan beberapa jalan untuk mengajarkan sikap yaitu menyajika dan perasaan tidak senang (aspek afektif), menanamkan kebiasaan untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan (aspek kerelaan).

e. Pendidikan dalam hal perilaku

Perilaku adalah perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang mengharuskan berperilaku. Karakteristik perilaku ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa menggunakan alat bantu. Perilaku tertutup adalah perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat atau metode tertentu misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi, takut.

f. Pembinaan kesehatan

Tidak hanya hak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan penghuni Panti Terpadu baik anak-anak terlantar, gelandangan, lansia terlantar, serta penyandang disabilitas di Panti juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikis. didalam undang-undang No 23 tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-

unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan Lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit) dan eksternal (lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya. Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia. Yang menyangkut kesehatannya juga terdapat saling berhubungan antara kesehatan fisik dan mental. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis mempengaruhi keadaan fisik.

Konsep “sehat”, *World Health Organization* (WHO) merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu “keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat”. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial.

Kebalikan dari keadaan sehat adalah sakit. Menurut Calhoun (Widianto & Zulaeha, 2016) Konsep “sakit” dalam bahasa kita terkait dengan tiga konsep dalam bahasa Inggris, yaitu *disease*, *illness* dan *sickness*. Ketiga istilah ini mencerminkan bahwa kata “sakit” mengandung tiga pengertian yang berdimensi biopsikososial. Secara khusus, *disease* biologis, *illness* berdimensi psikologis, dan *sickness* berdimensi sosiologis. *Disease* penyakit berarti suatu penyimpangan yang simtomnya diketahui melalui diagnosis. Penyakit berdimensi biologis dan objektif. Penyakit ini bersifat independen terhadap pertimbangan-pertimbangan psikososial, dia tetap ada tanpa dipengaruhi keyakinan orang atau masyarakat terhadapnya. Tumor, influenza, dan AIDS adalah suatu penyakit. Simptomnya dapat dikenali dari suatu diagnosis, baik dengan menggunakan indera atau menggunakan alat-alat bantu tertentu dalam suatu diagnosis.

Illness adalah konsep psikologis yang menunjuk pada perasaan, persepsi, atau pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatannya atau keadaan tubuh yang dirasa tidak enak (Mutaafi, 2015). Sebagai pengalaman subjektif, maka *illness* ini bersifat individual. Seseorang yang memiliki atau terjangkit suatu penyakit belum tentu dipersepsi atau dirasakan sakit oleh seseorang tetapi oleh orang lain hal itu dapat dirasakan sakit. Sedangkan *sickness* merupakan konsep sosiologis yang bermakna sebagai penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan (*illness* atau *disease*). Dalam keadaan *sickness* ini orang dibenarkan melepaskan tanggung jawab, peran, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan saat sehat karena adanya ketidaksehatannya. Kesakitan dalam konsep sosiologis ini berkenaan dengan peran khusus yang dilakukan sehubungan dengan perasaan kesakitannya dan sekaligus memiliki tanggung jawab baru yaitu mencari kesembuhan.

Pembinaan Kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup upaya peningkatan (promotif) yaitu berupa kegiatan penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan, pencegahan (preventif) yaitu berupa kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, seperti pemberian imunisasi. Dan yang terakhir kegiatan pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang berupa rujukan ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan atau pemulihan terhadap penyakit (Zulfitri, 2015).

Diantara berbagai macam bentuk Pembinaan dalam Panti Terpadu yang diuraikan ini dilihat dari proses pelaksanaan secara sifat Pembinaan penghuni Panti Terpadu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sifat, yaitu pertama Pembinaan yang bersifat yuridis dan kedua Pembinaan yang bersifat non-yuridis.

a. Rehabilitasi Sosial

Depsos menyatakan, “Pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial terhadap masa depan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kemauan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan sosial budaya, serta memulihkan kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”. Menurut Sri Yuni rehabilitasi sosial yaitu:

“Suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan, dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar”.

Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukannya. Fungsi-fungsi tersebut memiliki peranan yang bermanfaat bagi kegiatan rehabilitasi. Seperti yang dikemukakan Hanafi Dahlan (Asriansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial memiliki fungsi pokok, yaitu: (1) Pencegahan, Mencegah timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial, mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat serta mencegah timbulnya kembali permasalahan kesejahteraan sosial yang pernah terjadi oleh perseorangan, keluarga, dan masyarakat. (2) Rehabilitasi, Sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. (3) Pengembangan, Fungsi yang mengandung tiga ciri pokok yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan, menjalarnya efek ganda dalam lingkungan sosial keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. (4) Penunjang Berkaitan dengan pembangunan nasional mengandung makna penting sebagai salah satu unsur yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu program, baik intra maupun intersektoral. Program rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial yang dilaksanakan oleh Panti Terpadu Provinsi Banten ini.

Hubungan Dengan Instansi Dan Organisasi Sosial Terkait

Panti Terpadu Provinsi Banten akan menjalin kerja sama dengan beberapa instansi, organisasi dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial penghuni panti yaitu :

1. Dinas Kesehatan

Kerjasama dengan kesehatan dilakukan untuk penyediaan tenaga pelayanan kesehatan antara lain dokter dan perawat, perawatan lebih lanjut di rumah sakit atau puskesmas serta pemeriksaan kesehatan penghuni panti sebelum diterima menjadi santunan terhadap penyakit menular untuk mendapatkan keterangan bahwa penghuni panti tersebut tidak mengidap penyakit menular.

Adapun manfaatnya untuk mempermudah penghuni panti untuk memeriksa kesehatan tanpa harus keluar panti dan memberikan pelayanan dan perawatan untuk kesehatan penghuni panti yang sedang sakit.

2. Pemuka agama

Pemuka agama seperti ustad, pastor, pendeta dan pemuka agama lainnya dilibatkan dalam hal pendidikan agama, pemberian ceramah dan lain-lain untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan para klien.

Manfaatnya untuk mengajarkan penghuni Panti Terpadu yang beragama Islam untuk mengaji Al-Quran, shalat berjamaah dan memberikan ceramah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan rajin menunaikan shalat dan berbuat kebaikan. Serta layanan keagamaan untuk agama lainnya yang dilakukan oleh pemuka agama sesuai masing-masing agama mereka.

3. Kepolisian

Kerja sama dengan kepolisian bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan panti dan lingkungan sekitarnya agar usaha pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perencanaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Penganggaran terpadu adalah aktivitas yang dilakukan dalam penyusunan anggaran yang mana merupakan pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya duplikasi, khususnya untuk keperluan operasional. Penganggaran terpadu umumnya melibatkan suatu gugus satuan kerja, dimana terdapat keterpaduan pengelola kegiatan, keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan, keterpaduan antar program.

Manfaat anggaran adalah adanya keterarahan bersama dalam mencapai tujuan, selain itu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang diperlukan. Selain manfaat, dapat juga dikatakan bahwa suatu anggaran memiliki keterbatasan, yaitu adanya asumsi sehingga mengandung bersifat ketidakpastian, adanya paksaan untuk melaksanakan anggaran sehingga menimbulkan hal tertentu bagi beberapa

orang, dan masih banyak lagi. Jadi perlu diketahui bahwa anggaran terkait dengan anggaran lainnya.

Sudah seyogyanya suatu Panti Terpadu mempunyai tujuan dan arah yang jelas, dengan demikian strategi dilakukan dengan tujuan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang disertai dengan pengendalian yang efektif. Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan Panti Terpadu dengan tujuan untuk menjamin adanya suatu mutu pembelanjaan, kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Jadi penggunaan anggaran yang tepat sasaran perlu dievaluasi atas komitmen setiap satuan kerja yang ada. Bahwa suatu anggaran merupakan alat pengendalian berarti adanya suatu pengawasan. Pengawasan menunjukkan adanya membandingkan realisasi yang ada dengan rencana yang sudah ada. Melakukan perbaikan apabila terdapat temuan adanya suatu penyimpangan yang merugikan.

KESIMPULAN

Berikut simpulan yang dapat disajikan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Dasar hukum pelaksanaan Program Kawasan Panti Terpadu Provinsi Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemprov Banten baru memiliki dua pelayanan PMKS, diantaranya panti bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Pemprov Banten terus berupaya untuk memenuhi amanat undang-undang, dan rencana pembangunan kawasan terpadu sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas kesulitan yang di hadapi oleh PMKS. Kawasan Terpadu Panti Sosial tersebut direncanakan akan dibangun diatas lahan dengan luas 8 hektar, dimana akan dibangun sebanyak 4 gedung untuk memberikan pelayanan kepada 4 PMKS. Rencananya akan dibuat 4 cluster, masing-masing untuk disabilitas, anak telantar, lansia terlantar, dan gelandang atau pengemis. Diharapkan dengan adanya proyek kawasan panti asuhan terpadu ini dapat mengurangi jumlah Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandang atau Pengemis, serta membantu penyandang disabilitas dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka serta membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

Tujuan dari proyek kawasan Panti Terpadu Provinsi Banten ini adalah sebagai tempat untuk melindungi, melayani, mengasuh dan mendampingi anak-anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan atau pengemis, serta penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan karakter diri untuk bekal hidup di masa mendatang, memfasilitasi kebutuhan mereka dalam hal pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan pelatihan keterampilan sehingga mereka mempunyai keterampilan jika sudah tidak berada di area Panti Terpadu. Aspek pencitraan yang akan ditampilkan pada proyek Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten adalah menciptakan suasana yang mengandung makna kekeluargaan bagi seluruh penghuni panti asuhan serta menciptakan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar agar semangat kekeluargaan yang diikutsertakan dalam proyek ini dapat membantu perkembangan anak asuh supaya dapat berkembang selayaknya berada di keluarga sendiri hal ini ditandai dengan adanya fasilitas yang diberikan.

Fungsi Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten ini tidak hanya sebagai alternatif pengasuhan saja melainkan juga mendidik anak asuhnya menjadi pribadi unggul, berkompeten, serta memiliki wawasan yang luas dengan pemberian pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan pelatihan keterampilan bagi penghuninya. Ada beberapa teknologi yang akan diterapkan pada proyek Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten seperti penggunaan solar panel untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik panti asuhan ; Menggunakan teknologi pengolahan pemanenan air hujan (rain harvesting) untuk membantu memenuhi kebutuhan air; Menggunakan teknologi dalam bidang keamanan bangunan seperti fire fighting dan CCTV serta sarana dan prasarana lainnya.

Panti Asuhan Terpadu di Provinsi Banten ini menerapkan sistem ramah lingkungan hal ini dengan adanya prinsip yang diterapkan yaitu mengolah limbah yang dihasilkan oleh panti asuhan ini secara mandiri. Kawasan Panti asuhan ini memiliki kesan terbuka pada masyarakat untuk datang ke lingkungan panti, dengan begitu penyediaan fasilitas publik yang dapat menampung aktivitas mereka, akses mudah, nyaman tidak menutup kemungkinan masyarakat akan dengan senang hati akan datang ke lingkungan panti asuhan sehingga terjadi interaksi sosial. Panti Terpadu

Provinsi Banten akan menjalin kerja sama dengan beberapa instansi, organisasi dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial penghuni panti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, S. (2015). Urgensi diagnosis dalam mengatasi kesulitan belajar. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/Aian.V2n1a1>
- Amalia, W., & Zulyadi, T. (2024). Pelayanan sosial sebagai upaya pemenuhan keberfungsian sosial disabilitas netra di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i1.17051>
- Asriansyah, M. N., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 98–111. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4838>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Fitriah, H., Darmawan, D., & Faturrohman, N. (2021). Hubungan kecakapan vokasional khusus dengan kesiapan kerja peserta pelatihan tata boga. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1). <https://doi.org/10.30870/e-plus.v6i1.11425>
- Hendrayani, M. (2020). Layanan sosial berbasis kolaborasi komunitas di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-03>
- Hidayatullah, K. H. (2014). Analisis kluster untuk pengelompokan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1). <https://doi.org/10.26714/jsunimus.2.1.2014.%25p>
- Manela, C. (2015). Pemilihan, penyimpanan dan stabilitas sampel toksikologi pada korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1). <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/243>
- Mutaafi, F. (2015). Konstruksi sosial masyarakat terhadap penderita kusta. *Paradigma*, 3(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12376>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Cakra Books.
- Nurjismi, R. (2021). Potensi pengembangan pertanian perkotaan oleh lanjut usia untuk mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Ilmiah Respati*, 12(1), 11–28. <https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/pertanian/article/view/1406>
- Ramli, C. (2018). *Rehabilitasi social holistik sistematik terhadap korban napza di brskpn-galih pakuan*. Brskpn galih pakuan. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46106>
- Sugiyono. (2018). *Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widianto, E., & Zulaeha, I. (2016). Pilihan bahasa dalam interaksi pembelajaran bahasa indonesia bagi penutur asing. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.15294/seloka.v5i2.13074>
- Yossi, S. (2018). *Evaluasi pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 106/HUK2009 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di lingkungan departemen sosial (Studi pelaksanaan program rehabilitasi panti sosial bina remaja rumbai dalam membina remaja putus sekolah)*. Ilmu Pemerintahan S. 2. <https://repository.uir.ac.id/444/>
- Yusuf, M. (2022). *Manajemen bencana Panti Jompo Budhi Dharma dalam menghadapi pandemi Covid-19*. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/211907>
- Zulfitri, R. (2015). Analisis kebijakan pelayanan kesehatan primer dalam manajemen penatalaksanaan penyakit kronis lansia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 52–58. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/163/0>